

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2025-2029**

KECAMATAN PANEKAN



KABUPATEN MAGETAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 ini. Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Semoga dengan ditetapkan Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan semua pihak sebagai mitra kerja

Magetan, 19 Desember 2025


CAMAT PANEKAN
YANU HARI WIBOWO, S.STP
Pembina
NIP. 19800121 199810 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	27
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	27
2.1.6. Dukungan BUMD	31
2.1.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah	32
2.2. Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah	32
2.2.1 Permasalahan pelayanan perangkat daerah	32
2.2.2. Isu Strategis	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magetan	37
3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	39
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	40
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB.KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41

4.1. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output.....	41
4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur.....	53
4.3. Sub Kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah.....	63
4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	64
4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	69
BAB V PENUTUP.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkanannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Magetan Tahun 2025 – 2029. Selain itu perlunya penyesuaian dari kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar

terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan Kecamatan Panekan yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 2 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Kementrian Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005–2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024 nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Magetan;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Panekan tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum
1.3	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
1.4	Sistematika Penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Memuat Tugas , fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan Kelompok sasaran layanan
2.1.1	Tiugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai 4 dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya (mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (SPM, SDG's, indikator yang telah di ratifikasi Pemerintah, dan indikator pelayanan perangkat daerah lainnya

2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	Berisi kelompok sasaran yang mendapatkan pelayanan Perangkat Daerah
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	Berisi uraian mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
2.1.6	Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Berisi uraian dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja
2.1.7	Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	Berisi uraian kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	Memuat Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah dan Isu Strategis
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2.2.2	Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun rencana
BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN		
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029	Tujuan dan sasaran didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
3.2	Strategi Perangkat Daerah	Memuat tentang Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3.3	Arah kebijakan Perangkat Daerah	Rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Restra PD.
BAB IV: PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output	Berisi program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output dari pohon kinerja
4.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur	Rencana program, kegiatan, subkegiatan, kinerja, indikator kinerja, dan pagu indikatif
4.3	Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029 melalui IKU Perangkat Daerah.
4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.

4.5	arget Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Berisi target kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
BAB V: PENUTUP		
Menyajikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.		

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahankecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Panekan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANEKAN :

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Panekan

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Panekan

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
 - d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
 - e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi

kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusanKepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik;dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;

- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. Sub. Bagian Keuangan dan PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;

- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain ynag diberikan oleh Sekretaris.

e. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);

- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;

- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Panekan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Struktur Kecamatan terdiri dari :

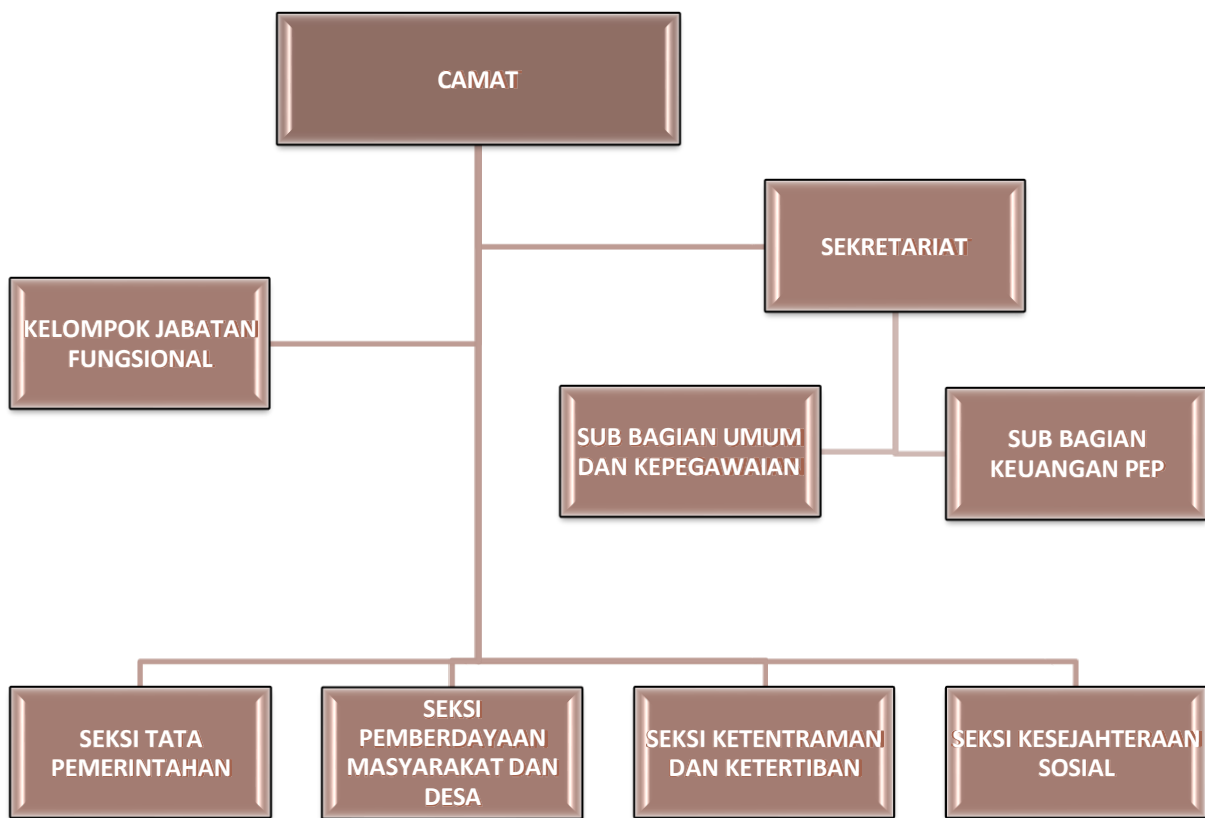
- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

KELURAHAN

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat

- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat
- h.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat rapat dinas kelurahan

- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat

- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunaan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

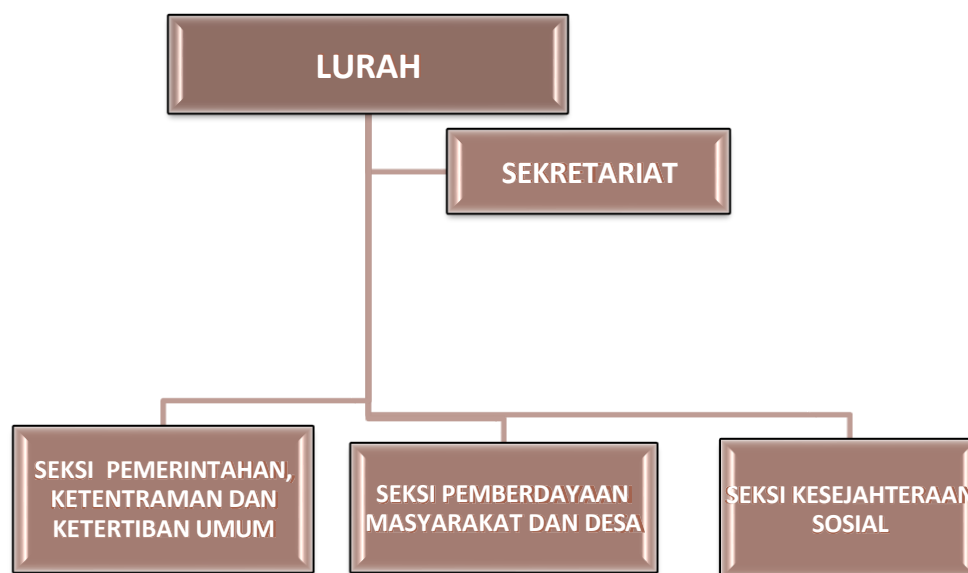
5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan

- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah 14 Orang dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin

Tabel 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/ Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV/b	0	0	0
2	IV/a	3	0	3
3	III/d	3	0	3
4	III/c	3	0	2
5	III/b	3	1	5
6	III/a	0	0	0
7	II/d	0	1	1
8	II/c	0	0	0
9	II/b	0	0	0
10	II/a	0	0	0
Jumlah		12	2	14

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Panekan Kab. Magetan

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Camat	IIIa	1	1	-
2	Sekretaris	IIIb	1	1	-
3	Kepala Seksi	IVa	3	3	-
4	Kepala Sub. Bag.	IVb	2	2	-
5	Lurah	IVa	1	1	-
6	Sekretaris Kelurahan	IVb	0	-	-
7	Kepala Seksi Kel	IVb	3	3	-
8	Fungsional Umum	-	3	2	1
Jumlah			14	13	1

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Panekan Kab Magetan

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana	2	2	-
2	Sarjana	6	6	-
3	Sarjana Muda (D3)	4	3	1
4	SLTA	2	1	1
Jumlah		14	12	2

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Panekan Kab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.4

Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Spama / Diklatpim Tk. III	3	3	-
2	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	4	-	-
	Jumlah	5	-	-

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Panekan Kab Magetan

Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5

Daftar Sarana dan Prasarana Kec. Panekan Kab Magetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4 (empat)	Unit	1
2.	Kendaraan roda 2 (dua)	unit	6
3.	Mesin Ketik	Unit	0
4.	Mesin Jumlah Listrik	Unit	0
5.	Rak besi	Unit	5
6.	Papan Visual	Unit	3
7.	Papan Pengumuman	Unit	1
8.	LCD Proyektor	Unit	2
9.	Lemari Kayu	Unit	7
10.	Meja Tulis	Unit	14
11.	Kursi rapat kayu	Unit	8
12.	Meja Komputer	Unit	6
13.	Telivisi	Unit	3
14.	Amplifirdan Saund System	Unit	2

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
15.	Wirales	Unit	1
16.	CPU unit	Unit	5
17.	Laptop	Unit	3
18.	Printer	Unit	5
19.	Kamera Digital	Unit	1
20.	Audio Amplifier	Unit	1
21.	Loudspeaker	Unit	4
22.	Bangunan Gedung Permanen	Unit	7
23.	Tanah Kosong/pertanian	Unit	23
24.	Tanah bangunan	Unit	14
25.	Tanah lapangan	Unit	2
26.	Sepeda motor	Unit	2
27.	Timbangan Bayi	Unit	4
28.	Lemari Penyimpan	Unit	11
29.	Mesin Ketik	Unit	1
30.	Filing Besi/metal	Unit	2
31.	Lemari kaca	Unit	3
32.	Kursi besi	Unit	0
33.	Meja tulis	Unit	10
34.	Meja rapat	Unit	3
35.	Meja panjang pelayanan	Unit	1
36.	Kursi rapat	Unit	45
37.	Kursi Tamu	Unit	10
38.	Sofa	Unit	1
39.	Saund System	Unit	1
40.	Wirales	Unit	1
41.	Dispenser	Unit	1
42.	PC Unit	Unit	3
43.	Laptop	Unit	4
44.	Printer	Unit	5
45.	Meja Tamu Biasa	Unit	1

Sumber : Pengurus Barang Kec. Panekan Kab Magetan

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub-bab ini membahas mengenai kinerja pelayanan perangkat daerah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah terkait kepada masyarakat. Dalam proses penyusunan Renstra, evaluasi terhadap kinerja pelayanan ini sangat penting untuk mengidentifikasi capaian dan tantangan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Oleh karena itu, sub-bab ini akan menguraikan berbagai capaian indikator kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Panekan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Berikut ini adalah data capaian kinerja pelayanan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tahun 2020-2024 :

Tabel 2.6

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panekan
Kabupaten Magetan Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Panekan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya (IKU)	Target Renstra Kecamatan Panekan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	IKM Kecamatan Panekan			√	78	78	78	80	89	78,11	78,56	79,82	83,29	88,98	1,01	1,07	1,02	1,0	0,9
2	Meningkatnya Kinerja Kecamatan			√		-	61	65	70	-	-	68,7	66,8	75	-	-	1,12	1,03	1,07
3	Berpredikat Kinerja Kecamatan			√				-	82,60	-	-	-	-	82,55	-	-	-	-	0,9
4	Nilai SAKIP Kecamatan Panekan			√				-	84,75	-	-	-	-	87,25	-	-	-	-	1,02

Secara umum, Kecamatan Panekan menunjukkan kinerja yang stabil dan cenderung positif dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, terutama dalam indikator pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Berikut adalah rincian per indikator:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Panekan

- Target : Target IKM Kecamatan Panekan ditetapkan pada angka yang relatif stabil, yaitu 78 pada tahun 2020 hingga 2022, dan meningkat menjadi 80 (2023) serta 89 (2024).
- Capaian Kinerja: Realisasi IKM pada tahun 2020-2022 selalu melampaui target dengan rasio capaian di atas 1,0 (1,01 pada 2020, 1,07 pada 2021, dan 1,02 pada 2022).
- Tren Tahun Terakhir: Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi sedikit di bawah target, meskipun nilai IKM yang dicapai tetap tinggi (83,29 realisasi dari 80 target pada 2023, dan 88,98 realisasi dari 89 target pada 2024).

2. Meningkatnya Kinerja Kecamatan

- Target : Indikator ini mulai memiliki target terukur pada tahun 2021 (61) dan terus meningkat hingga 2023 (70).
- Capaian Kinerja: Realisasi capaian kinerja kecamatan pada tahun 2021 hingga 2023 selalu melampaui target yang ditetapkan, dengan rasio capaian tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar 1,12. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

3. Berpredikat Kinerja Kecamatan

- Indikator ini hanya tercatat dengan target dan realisasi pada tahun 2023.
- Capaian Kinerja: Target yang ditetapkan tidak disebutkan, namun realisasi yang dicapai adalah 82,55, sedikit di bawah target yang tertulis yaitu 82,60 (rasio capaian 0,9).

4. Nilai SAKIP Kecamatan Panekan

- Target : Sama seperti indikator sebelumnya, indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini hanya tercatat dengan target dan realisasi pada tahun 2023.
- Capaian Kinerja: Kecamatan Panekan berhasil mencapai realisasi SAKIP sebesar 87,25, yang melampaui target 84,75 (rasio capaian 1,02). Ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas dan manajemen kinerja Kecamatan Panekan berjalan sangat baik.

Kesimpulan untuk Renstra 2025-2029:

Hasil capaian menunjukkan bahwa Kecamatan Panekan memiliki modal yang kuat, terbukti dari nilai IKM yang tinggi dan capaian SAKIP yang melampaui target.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panekan
Kabupaten Magetan Tahun 2020-2024

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran	196.800.000	-	-	-	-	184.281.476	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76.500.000	-	-	-	-	76.129.900	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-		
Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-		
Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	116.700.000	-	-	-	-	110.817.950	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	268.000.000	-	-	-	-	263.700.335	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.000.000	-	-	-	-	11.965.950	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-		
Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000	-	-	-	-	1.044.652.044	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-		
Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	2.558.226.126	3.055.015.790	2.263.712.102	3.001.397.812	-	2.009.061.467	2.934.095.907	2.353.795.929	2.962.730.801		0,78	0,96	0,98	0,98	5,45	13,9
Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	-	3.203.200	8.004.600	118.719.060	99.687.200	-	3.203.200	8.004.600	116.144.100	97.071.350		1,00	1,00	0,97	0,97	116,6	114,7
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	818.815.341	18.547.400	1.022.437.600	926.158.400	-	744.938.588	15.048.350	1.004.854.850	911.482.000		0,9	0,8	0,98	0,98	4,2	7,08
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	26.025.400	46.820.350	-	-	-	26.023.900	41.737.950	-	-		0,99	0,89	-	-	79,9	60,4
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	13.913.750	8.305.000	13.523.700	24.284.700	-	13.913.750	8.305.000	13.517.100	24.264.450		1,00	1,00	0,99	0,99	20,44	20,4

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panekan yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Panekan msebagai pengguna layanan dan selain sasaran kelompok layanan tersebut dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Forkopimca, Lembaga dll.

Masyarakat Kecamatan Panekan sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran Kecamatan Panekan yaitu terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal yang hanya bisa di capai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Panekan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Kelompok sasaran pemerintahan Kecamatan Panekan pada pihak- pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.1.6 Dukungan BUMD

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan ,sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting.,termasuk kerjasama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah

meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas. Namun demikian Kecamatan Magetan tidak memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

2.1.7 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program/ kegiatan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tidak ada kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Panekan.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sebagai perangkat daerah tentu menghadapi berbagai permasalahan pelayanan publik yang dijumpai di tingkat kecamatan. Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah yang dihadapi oleh Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan

- keterbatasan sarana prasarana Pelayanan seperti kendaraan operasional, peralatan teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang mengurangi efisiensi kerja dan menghambat responsivitas pelayanan.
- Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat penyelenggara layanan dalam mencapai tujuan kinerja pelayanan.

2. Belum optimalnya Pembangunan wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan karena kurangnya adaptasi Kecamatan terhadap dinamika kewilayahan yang sangat dinamis
 - Dinamika kewilayahan yang sangat dinamis, seperti pertumbuhan penduduk, tuntutan globalisasi, kerawanan bencana, serta keamanan dan ketertiban masyarakat seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan perencanaan dan responsif yang memadai di tingkat kecamatan
 - Koordinasi antara pelaku kepentingan mengenai Pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan masih kurang terintegrasi.
- 3 Masih Rendahnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur Kecamatan
 - Tuntutan transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan Pembangunan menuntut Kecamatan untuk beradaptasi dan mengadopsi prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik, yang memerlukan perubahan mindset dan kapabilitas aparatur.

2.2.2 Isu Strategi

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Panekan dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Perumusan Isu Strategis Kecamatan Panekan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi memfokuskan pembangunan desa/kelurahan	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan	Belum optimalnya kelembagaan, birokrasi, serta transparansi informasi dan komunikasi publik	Tuntutan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif dalam menghadapi era globalisasi dan keterbukaan	Agenda reformasi birokrasi nasional, termasuk penguatan peran Kecamatan sebagai ujung tombak	Tuntutan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin kompleks dan cepat	Penguatan kelembagaan Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM serta kolaborasi antar Perangkat Daerah/stakeholder terkait

				elayanan masyarakat		
	Belum optimalnya Pembangunan wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan karena kurangnya adaptasi Kecamatan terhadap dinamika kewilayahan yang sangat dinamis		Globalisasi ekonomi dan teknologi digital yang mendorong perubahan cepat dalam pola social ekonomi wilayah	Agenda transformasi digital Nasional yang mengubah pola pelayanan, ekonomi dan interaksi kewilayahan	Mobilitas penduduk antarwilayah yang berdampak pada kebutuhan layanan administrasi kependudukan , social dan ekonomi di Kecamatan	Optimalisasi koordinasi dan fasilitasi terkait Pembangunan Dsa/Kelurahanserta peningkatan kemampuan adaptasi Kecamatan terhadap dinamika kewilayahan
	Rendahnya Kapsitas dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan		Tuntutan global terhadap profesionalisme aparatur pemerintahan dalam mewujudkan tata Kelola yang transparan,akuntabel dan berorientasi pelayanan	Agend reformasi Birokrasi Nasional yang berfokus pada peningkatan kompetensi, integrasi dan kinerja ASN	Perubahan kebutuhan Masyarakat local yang menuntut aparatur Kecamatan lebih adaptif, responsive dan profesional	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur Kecamatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025- 2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pada periode RPJMD baru ini, Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan pada periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

” MAGETAN NYAMAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN ”

MAGETAN NYAMAN,

Mencerminkan harapan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Kata "nyaman" mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologis.

MAGETAN MAJU,

Mencerminkan tekad untuk mengantarkan Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

MAGETAN BERKELANJUTAN,

Mencerminkan komitmen Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian Misi sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
2. Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan
3. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan
4. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Professional, Responsive, Adaptif dan Transparan.
5. Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran
6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan Antar Wilayah

7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram beraskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau.

Dalam kerangka perencanaan strategis, Misi Politik sejumlah 7 misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, ditransformasikan menjadi 4 tujuan guna menyederhanakan penyusunan arsitektur kinerja pembangunan. Proses transformasi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan esensi dan makna orisinal dari masing-masing Misi Kepala Daerah. Secara lengkap diuraikan dalam tabel berikut:

VISI	MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat 7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram beraskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		3. Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan
		4. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berasaskan Nilai Agama
2. Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan 5. Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran 6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah 7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram beraskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Investasi Daerah
		2. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Daerah
		3. Meningkatnya Kemandirian Sektor Pertanian Berbasis Industri dan Perdagangan
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan
		5. Menurunnya Angka Pengangguran melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan
3. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan	Profesional, Adaptif dan Transparan	3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik
		4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		5. Meningkatnya Kualitas ASN
		6. Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah
4. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan
		2. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan
		3. Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah

Sesuai tugas dan fungsi pokoknya, Kecamatan Panekan mempunyai peran untuk mensukseskan tujuan ke-3 “Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Transparan” dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Panekan Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 maka disusunlah tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Panekan beserta target tahunan yang menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah ini dimaksudkan untuk mempermudah penetapan indikator kinerja dan target tahunan secara terarah dan terukur. Tujuan dan sasaran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Panekan Tahun 2025-2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
NSPK : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahan : Sasaran RPJMD Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Panekan		Indeks Kepuasan Masyarakat II Skor	89	90	90,2	90,4	90,5	90,6	IKU
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Panekan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan II Nilai	83	83	83,2	83,4	88,5	88,6	IKU
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP II Nilai	85	87,3	87,5	87,9	88	88,2	IKU

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Panekan. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Panekan. Penahapan Renstra Kecamatan Panekan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Koordinasi pelaksanaan awal Renstra dan penguatan system dasar , peningkatan kapasitas SDM dan penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan Renstra	Penguatan penerapan system integrasi layanan dan peningkatan partisipasi publik	Pendalaman Evaluasi siatem penyempurnaan , berkelanjutan dan inovasi layanan untuk mendukung konsistensi pelayanan publik dan koordinasi fasilitasi kewilayahan	Pematangan keberlanjutan system dan Upaya transformasi digital dalam pelayanan publik maupun penyele nggaraan koordinasi dan fasilitasi kewilayahan sebagai Dasara penyusunan arah kebijakan berikutnya	Evaluasi akhir pelaksanaa Renstra agar tercapai dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan serta memastikan keberlanjutan transformasi digital pelayanan publik dan koordinasi fasilitasi kewilayahan

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029

Arah kebijakan Kecamatan Panekan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra disajikan dalam tabel Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Panekan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Merumuskan Arah Kebijakan Kecamatan Panekan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahan	Memfasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat di setiap lingkungan RT	Peningkatan penguatan tata kelola pemerintahan melalui modernisasi administrasi pemerintahan dan penguatan sistem pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi kecamatan	
			Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penguatan Budaya Kerja Inovatif	
			Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan publik di wilayah Kecamatan	
			Optimalisasi partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan wilayah dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan melalui Penguatan Mekanisme Musrenbang dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	
			Optimalisasi pelayanan publik melalui standarisasi layanan publik serta pengembangan inovasi pelayanan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Panekan hasil dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata. Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil cascading, dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. Secara lengkap pengambilan program, kegiatan dan sub-kegiatan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 4.1
Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Panekan

NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM//KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahan : Sasaran RPJMD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Panekan				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Panekan			Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah		Nilai indeks Pelayanan Publik Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

			Kecamatan Panekan		pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi		
				Terlaksananya, Koordinasi, Fasilitasi dan Layanan Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Panekan	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kegiatan ; Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Tersedianya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub.Kegiatan ; Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan social di Kecamatan Panekan		- Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan - Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi dan	- Jumlah fasilitasi layanan sosial,	Kegiatan ;	

				koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif	pembangunan SDM, serta penanganan bencana	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Tersedianya Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Sub.Kegiatan ; Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sarana prasarana umum kelurahan yang terpelihara - Jumlah Lembaga Masyarakat Kelurahan yang aktif dibina, Skor IKM Kelurahan Panekan, - Jumlah pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah, Persentase masyarakat miskin yang berpartisipasi dalam program sosial 	Kegiatan ; Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

				Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sub.Kegiatan ; Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terkelolanya Pokmas dan Ormas Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panekan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub.Kegiatan ; Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana prasarana kelurahan yang terbangun	Sub.Kegiatan ; Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	
				Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
			Terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Panekan		Persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya kamtibmas, penegakan	Jumlah kegiatan kamtibmas, penegakan	Kegiatan ;	

				peraturan daerah serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan	peraturan daerah serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Tersedianya Dokumen Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub.Kegiatan ; Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif di Kecamatan Panekan		Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan		
				Terlaksananya Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan ; Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

				Tersedianya Dokumen Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub.Kegiatan ; Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panekan			Nilai SAKIP		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kecamatan Panekan		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Panekan	Jumlah dokumen perencanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kegiatan ; Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah	1Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub.Kegiatan ; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Adminstrasi Keuangan dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan ; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Penatausahaan Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Sub.Kegiatan ; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terkelolanya barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah padaperangkat daerah	Kegiatan ; Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	

				Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	
				Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kecamatan) Jumlah Penyediaan Administrasi umum Perangkat daerah (Kelurahan)	Kegiatan ; Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Kantor Kecamatan Panekan dan Kelurahan Panekan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik	Sub.Kegiatan ;	

					Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub.Kegiatan ; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah (Kecamatan) Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kelurahan	Kegiatan ; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

					Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terpemeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Panekan Terpemeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Unit yang Dipelihara	Sub.Kegiatan ; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terpemeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Sub.Kegiatan ; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

				Terpemeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Panekan	Dipelihara/Direhabilitasi		
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--

4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub-kegiatan untuk lima tahun ke depan maka ditetapkanlah pagu anggaran dan target anggaran yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek Kecamatan Panekan

Tabel 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOMES/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												Keterangan		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome : " Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kecamatan Panekan"	Kepuasan ASN Kecamatan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan	80 Nilai	80 Nilai	-													
	1. Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan 2. Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	82 indeks			86 indeks	2.309.090.690	86,2 indeks	2.537.585.976	97 %	97,8 %	86,4 indeks	2.778.547.623	98 %	98,3 %	87 indeks	2.991.323.826	98,5 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah Output : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Panekan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dokumen	35 Dokumen	-	35 Dokumen	6.500.000	35 Dokumen	6.825.000	35 Dokumen	7.200.000	35 Dokumen	7.560.000	35 Dokumen	7.950.000			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	11 Dokumen	-	35 Dokumen	6.500.000	35 Dokumen	6.825.000	35 Dokumen	7.200.000	35 Dokumen	7.560.000	35 Dokumen	7.950.000			

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah															
Administrasi Keuangan Perangkat daerah Output : Terlaksananya Penatausahaan Adminstrasi Keuangan dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumenAdministrasi Keuangan Perangkat daerah	35 Dokumen	35 Dokumen	-	35 Dokumen	2.080.988.160	35 Dokumen	2.288.761.976	35 Dokumen	2.517.330.673	35 Dokumen	2.718.501.126	35 Dokumen	2.935.766.416	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Output : Tersedianya Dokumen Penatausahaan Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan	20 orang/bulan	280 Orang	-	280 orang	2.074.488.160	280 orang	2.278.936.976	280 orang	2.507.130.673	280 orang	2.707.941.126	280 orang	2.924.816.416	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Output : Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	25 Laporan	32 Laporan	-	32 Laporan	6.500.000	32 Laporan	6.825.000	32 Laporan	7.200.000	32 Laporan	7.560.000	32 Laporan	7.950.000	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Output Terkelolanya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	
Penatusahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Output : Tersedianya Penatusahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	
Administrasi Umum Perangkat daerah Output : Meningkatnya Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	108.320.000	12 Bulan	116.360.000	12 Bulan	122.166.000	12 Bulan	128.076.000	12 Bulan	134.990.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	5 Paket	-	12 Paket	6.500.000	12 Paket	6.825.000	12 Paket	7.200.000	12 Paket	7.560.000	12 Paket	7.950.000	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	12 Paket	-	12 Paket	40.000.000	12 Paket	42.000.000	12 Paket	44.100.000	12 Paket	46.305.000	12 Paket	48.650.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	8 Paket	-	12 Paket	8.000.000	12 Paket	8.400.000	12 Paket	8.820.000	12 Paket	9.261.000	12 Paket	9.750.000	
Penyediaan bahan Logistik Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	-	12 Paket	3.500.000	12 Paket	3.675.000	12 Paket	3.900.000	12 Paket	4.000.000	12 Paket	4.200.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	-	12 Paket	2.800.000	12 Paket	2.940.000	12 Paket	3.000.000	12 Paket	3.150.000	12 Paket	3.500.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – undangan Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	12 Dokumen	2.520.000	12 Dokumen	2.520.000	12 Dokumen	2.646.000	12 Dokumen	2.800.000	12 Dokumen	2.940.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	12 Laporan	20 Laporan	-	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	58.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Output : Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	49.282.530	12 Bulan	50.339.000	12 Bulan	52.785.950	12 Bulan	53.935.950	12 Bulan	57.125.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Output : Tersedianya barang dan jasa penunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	12.743.530	12 Laporan	13.400.000	12 Laporan	14.000.000	12 Laporan	14.700.000	12 Laporan	15.435.000	

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya barang dan jasa penunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	6.600.000	12	7.000.000	12	7.350.000	12	7.800.000	12	8.190.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output : Tersedianya barang dan jasa penunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 V	-	13 Laporan	29.939.000	13 Laporan	29.939.000	13 Laporan	31.435.950	13 Laporan	31.435.950	13 Laporan	33.500.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	64.000.000	12 Bulan	75.300.000	12 Bulan	79.065.000	12 Bulan	83.250.750	1 Bulan 2	87.400.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	6 Unit	-	4 Unit	46.000.000	5 Unit	48.300.000	5 Unit	50.715.000	5 Unit	53.250.750	5 Unit	55.900.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya Output : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Panekan	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	6 Unit	-	4 Unit	18.000.000	4 Unit	27.000.000	4 Unit	28.350.000	4 Unit	30.000.000	4 Unit	31.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan Panekan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	-											
	1. Nilai indeks Pelayanan Publik 2. Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi				2,5 Indeks 100 %	15.000.000	2,6 Indeks 100 %	16.000.000	2,8 Indeks 100 %	18.000.000	2,9 Indeks 100 %	20.000.000	3 Indeks 100 %	22.000.000	

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Output : Terlaksananya, Koordinasi, Fasilitasi dan Layanan Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Panekan	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Panekan	12 Kegiatan	2 Kegiatan	-	12 Kegiatan	15.000.000	12 Kegiatan	16.000.000	12 Kegiatan	18.000.000	12 Kegiatan	20.000.000	12 Kegiatan	22.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Output : Tersedianya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	5 Dokumen	-	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	16.000.000	12 Dokumen	18.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	22.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan	100 Nilai	100 Nilai	-											
Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial di Kecamatan Panekan	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial				100 %	35.000.000	100 %	36.750.000	100 %	38.587.500	100 %	40.516.875	100 %	42.542.720	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Output : Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	7 Kegiatan	12 Kegiatan	-	12 Kegiatan	35.000.000	12 Kegiatan	36.750.000	12 Kegiatan	38.587.500	12 Kegiatan	40.516.875	12 Kegiatan	42.542.720	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Output : Tersedianya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah	12 Laporan	8 Laporan	-	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	36.750.000	12 Laporan	38.587.500	12 Laporan	40.516.875	12 Laporan	42.542.720	

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outcome : Terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Panekan	Persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan	-	-	-	100 %	101.384.200	100 %	104.425.726	100 %	107.558.500	100 %	109.709.670	100 %	111.903.863	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas Forkopimca	-	12 Kegiatan	-	12 Kegiatan	101.384.200	Kegiatan 12	104.425.726	12 Kegiatan	107.558.500	12 Kegiatan	109.709.670	12 Kegiatan	111.903.863	
Output : Terlaksananya kamtibmas, penegakan peraturan daerah serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan															
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	12 Laporan	-	12 Laporan	101.384.200	12 Laporan	104.425.726	12 Laporan	107.558.500	12 Laporan	109.709.670	12 Laporan	111.903.863	
Ouput : Tersedianya Dokumen Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80 %	80 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outcome Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif di Kecamatan Panekan	1. Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan 2. Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan				70 % 100 %	16.492.500	74 % 100 %	17.800.000	76 % 100 %	18.690.000	78 % 100 %	19.624.500	80 % 100 %	20.605.725	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Pemerintahan Desa	6 Kegiatan	12 Kegiatan	-	12 Kegiatan	16.492.500	12 Kegiatan	17.800.000	12 Kegiatan	18.690.000	12 Kegiatan	19.624.500	12 Kegiatan	20.605.725	
Output : Terlaksananya Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa serta															

pembangunan wilayah yang berkualitas															
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Output : Tersedianya Dokumen kegiatan yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	16 Dokumen	-	12 Dokumen	16.942.500	12 Dokumen	17.800.000	12 Dokumen	18.690.000	12 Dokumen	19.624.500	12 Dokumen	20.605.725	

KELURAHAN PANEKAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA outcome: "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang professional serta pelayanan administrasi public yang efektif dan efisien pada Kelurahan Panekan"	Kepuasan ASN Kelurahan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan	80 Nilai	80 Nilai	-											
	Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan				80,5 Indeks	320.850.000	80,7 Indeks	339.610.000	82 Indeks	359.229.000	84 Indeks	372.983.790	86 Indeks	387.542.020	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Output : Terkelolanya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	-	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	
Penatusahaan Barang Mili Daerah pada Perangkat Daerah Output : Tersedianya Penatusahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah Output : Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah di Tingkat Kelurahan Panekan	Jumlah Penyediaan Administrasi umum Perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	66.650.000	12 Bulan	70.900.000	12 Bulan	75.097.500	12 Bulan	79.390.000	12 Bulan	83.927.500	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	-	12 Paket	7.300.000	12 Paket	7.665.000	12 Paket	8.500.000	12 Paket	8.925.000	12 Paket	9.450.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Ouput : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	-	12 Paket	25.000.000	12 Paket	26.250.000	12 Paket	27.570.000	12 Paket	29.250.000	12 Paket	30.750.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	12 Paket	6.750.000	12 Paket	7.250.000	12 Paket	7.650.000	12 Paket	8.250.000	12 Paket	8.650.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	-	12 Paket	7.800.000	12 Paket	8.190.000	12 Paket	8.650.000	12 Paket	9.150.000	12 Paket	9.607.500	
Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	-	12 Paket	10.500.000	12 Paket	11.150.000	12 Paket	11.707.500	12 Paket	12.295.000	12 Paket	12.950.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Paraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	2.520.000	12 Dokumen	2.520.000	12 Dokumen	2.520.000	12 Dokumen	2.520.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD Output : Tersedianya Dokumen Administrasi Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	12 Laporan	3 Laporan	-	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	7.875.000	12 Laporan	8.500.000	12 Laporan	9.000.000	12 Laporan	10.000.000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	215.800.000	12 Bulan	226.590.000	12 Bulan	237.919.500	12 Bulan	242.880.590	12 Bulan	247.950.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output : Tersedianya barang dan jasa penunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.300.000	12 Laporan	6.615.000	12	6.950.000	12	7.300.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output : Tersedianya barang dan jasa penunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	209.800.000	12 Laporan	215.290.000	12 Laporan	226.304.500	12 Laporan	230.930.590	12 Laporan	235.650.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	38.400.000	12 Bulan	42.120.000	12 Bulan	46.212.000	12 Bulan	50.713.200	12 Bulan	55.664.520	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Output : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	4 Unit	-	1 Unit	1.200.000	1 Unit	1.200.000	1 Unit	1.200.000	1 Unit	1.200.000	1 Unit	1.200.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya OUTPUT : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Panekan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	37.200.000	1 Unit	40.920.000	1 Unit	45.012.000	1 Unit	49.513.200	1 Unit	54.464.520	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan	89 %	100 %	-											
	Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan				80 Nilai	861.150.000	80,5Nilai	904.207.500	82Nilai	949.430.000	84 Nilai	996.901.500	86 Nilai	1.046.746.650	

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Output : Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan partisipatif	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	861.150.000	12 Bulan	904.207.500	12 Bulan	949.430.000	12 Bulan	996.901.500	12 Bulan	1.046.746.650	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 unit	3 unit	-	5 unit	550.000.000	6 unit	577.500.000	7 unit	606.375.000	7 unit	636.693.750	7 unit	668.528.500	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Output : Terkelolanya Pokmas dan Ormas Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panekan	Jumlah Jumlah Pokmas dan Ormas dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	-	3 Pokmas/Ormas	302.000.000	5 Pokmas/Ormas	317.100.000	6 Pokmas/Ormas	332.955.000	6 Pokmas/Ormas	349.602.750	6 Pokmas/Ormas	367.082.900	
Evaluasi Kelurahan Output : Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	-	12 Laporan	9.150.000	12 Laporan	9.607.500	12 Laporan	10.100.000	12 Laporan	10.605.000	12 Laporan	11.135.250	

4.3 Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2025-2029, Kecamatan Panekan mempunyai peran untuk mensukseskan tujuan yang ke-3 yaitu “Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Transparan” dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Untuk memfokuskan program dan kegiatannya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Kawedanan maka ditetapkan daftar sub-kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk memfokuskan kegiatan, untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Panekan maka ditetapkan daftar sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembanguna daerah.

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Pogram Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas kinerja Kelurahan serta kinerja Pemerintahan bidang Sosial di Kecamatan Panekan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan // Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan • Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa //Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 	Mendukung tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan sasaran mengurangi ketimpangan antar wilayah
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan Panekan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan// Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 	

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RenstraPD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panekan

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	89	90	90,2	90,4	90,5	90,6	IKU
2	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	83	83	83,2	83,4	83,5	83,6	IKU
3	Nilai SAKIP	Nilai	85	87,3	87,5	87,7	87,9	88	IKU

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama IKU Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kecamatan Panekan
2025-2029

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Panekam	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$ <p>9 parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana 	Laporan SKM Kecamatan Panekan	Kecamatan Panekan

2.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Panekan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	<p>Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya 	Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Magetan	Kecamatan Panekan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panekan	Nilai SAKIP	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, 	Inspektorat Kab Magetan	Kecamatan Panekan

			<p>dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)</p> <p>3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</p> <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 2. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LkjIP dijadikan auan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya 		
--	--	--	---	--	--

			<p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE <p>3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya</p>		
--	--	--	--	--	--

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kawedanan sebagaimana dijelaskan pada table dibawah ini

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Panekan

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		NIHIL							

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, 19 Desember 2025

CAMAT PANEKAN

YANI HARI WIBOWO, S.STP

Pembina

NIP. 198001211998101002